

ANALISIS EFEKTIVITAS PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DI TONTALETE KABUPATEN MINAHASA UTARA

Fini A.D Angkouw¹, Daisy S.M Engka², Ita Pingkan F. Rorong³

^{1,2,3}Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia

E-mail : angkouwfini2@gmail.com

ABSTRACT

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Program alokasi dana desa ini tentunya suatu terobosan yang sangat baik dan positif bagi seluruh masyarakat terutama masyarakat di pedesaan, karena alokasi dana desa ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan desa, seperti infrastruktur, peningkatan ekonomi dan pembinaan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menemukan tingkat partisipasi, transparan, akuntabel dan efektivitas penyaluran ADD. Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan menggunakan data primer. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat yang langsung terlibat dan mengetahui tentang pengelolaan alokasi dana desa juga beberapa petani, wiraswasta, kaum buruh, karang taruna, IRT di desa Tontalet yakni sebanyak 100 orang. Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Deskriptif yang bertujuan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa analisis deskriptif mengenai tingkat partisipasi memiliki rata-rata 4.09, transparansi memiliki rata-rata 4.14 dan akuntabel memiliki rata-rata 4.13.

Kata Kunci : Partisipasi; Transparan; Akuntabel; Efektivitas Penyaluran.

ABSTRACT

The provision of broad autonomy to the regions is directed at accelerating the realization of community welfare through improving services, empowerment, and community participation. This village fund allocation program is certainly a very good and positive breakthrough for all communities, especially people in rural areas, because this village fund allocation aims to improve the welfare of the community and villages, such as infrastructure, economic improvement and community development. The purpose of this study was to determine and find the level of participation, transparency, accountability and effectiveness of the distribution of ADD. In this study, the method used was a quantitative method using primary data. The population in this study is all tools that are directly involved and know about the management of village fund allocations as well as some farmers, self-employed people, workers, coral cadets, IRT in Tontalet village, which is as many as 100 people. The analytical method used in this study is Descriptive Analysis which aims to analyze data by describing or describing the data that has been collected. Based on the results of research that researchers have conducted, it can be concluded that descriptive analysis of participation rates has an average of 4.09, transparency has an average of 4.14 and accountable has an average of 4.13.

Keywords: Participation; Transparency; Accountability; Effectiveness of Distribution.

1. PENDAHULUAN

Otonomi daerah diselenggarakan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pemerintah daerah juga melakukan pengembangan yang disesuaikan wilayah masing-masing. Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Franseen, 2021). Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah

berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berangkat dari kondisi yang demikian, kini desa dianggap sebagai basis pembangunan sekaligus penerapan dari pembangunan yang mencirikan *bottom-up*. Dimana semua rencana dan realisasi pembangunan sendiri harus berpatokan pada aspirasi masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat desa yang menjadi sasaran dalam setiap program pemberdayaan masyarakat. Tujuannya yaitu memberikan kemandirian atau daya kepada masyarakat desa agar bisa mengurus dirinya sendiri.

Banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat harus menjalani hidup dibawah standar atau yang serba kekurangan keadaan seperti ini akan menimbulkan beragam masalah yang sering terjadi di dalam lingkup masyarakat desa. Baik dalam pendidikan, pelayanan kesehatan maupun ekonomi. Begitu banyak usaha dari pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut, dengan beragam program yang dibuat. Karena itu masyarakat yang demikian perlu diperdayakan untuk lebih mandiri dalam menghadapi tantangan hidup yang semakin tak terkendali ini.

Dengan kondisi seperti itulah berbagai program bermunculan setiap tahunnya baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Seperti halnya desa Tontalate juga menerapkan peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat di dalamnya. Pemerintah desa Tontalate juga berusaha membuat desa tersebut menjadi sejahtera dengan begitu banyak pembangunan (seperti pembuatan selokan-selokan secara bertahap pada tahun 2016-2020) kemudian pelatihan-pelatihan yang dibuat untuk masyarakat dalam hal ini Karang Taruna dan Ibu PKK. Pada tahun 2021 Pemerintah desa Tontalate sendiri telah membuat/memasang CCTV di beberapa titik yang ada, guna meningkatkan keamanan desa.

Pemerintah juga menyediakan wadah untuk setiap anak-anak muda untuk lebih mencintai tradisi dengan diadakan kelas untuk tarian Kabasaran. Dengan setiap program-program pemerintah yang telah dibuat dan yang akan dilaksanakan sangat membantu masyarakat untuk menuju desa yang sejahtera. Salah satu dari program-program yang dibuat pemerintah pusat maupun daerah, adapun program pemberdayaan itu adalah pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Baura dan Mandey, 2014). Salah satu dari program-program yang dibuat pemerintah pusat maupun daerah, adapun program pemberdayaan itu adalah pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima pemerintah desa 30 persen alokasi dana desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya BPD, biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. Sedangkan 70 persen dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk memberantas kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat desa, BUMDes, Kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna dan Linmas.

Banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat harus menjalani hidup dibawah standar atau yang serba kekurangan keadaan seperti ini akan menimbulkan beragam masalah yang sering terjadi di dalam lingkup masyarakat desa. Baik dalam pendidikan, pelayanan kesehatan maupun ekonomi. Begitu banyak usaha dari pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut, dengan beragam program yang dibuat. Karena itu masyarakat yang demikian perlu diperdayakan untuk lebih mandiri dalam menghadapi tantangan hidup yang semakin tak terkendali ini. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat tentang Tingkat Partisipasi Alokasi Dana Desa.
2. Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat tentang Tingkat Transparan Alokasi Dana Desa.
3. Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat tentang Tingkat Akuntabel Alokasi Dana Desa.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Keuangan Daerah

Keuangan Daerah merupakan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Dalam arti sempit, keuangan daerah yakni terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan APBD. Oleh sebab itu keuangan daerah identik dengan APBD. Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005, "Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut" (Daerah, 2005). Ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan yang dikelola langsung adalah APBD dan barang-barang inventaris milik daerah. Sedangkan keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik (BUMD)" (Hartanto, 2017). Siklus pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu rangkaian proses pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari penganggaran yang ditandai dengan ditetapkannya APBD, pelaksanaan dan penatausahaan atas APBD, serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Dr. Sumule Tumbo, SE., 2019).

2.2 Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa adalah perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Kewenangan desa dan memperkuat kemandirian desa Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten (Djumadi, 2015).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mencantumkan definisi dari ADD. Dalam peraturan ini menyebutkan Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (Maros & Juniar, 2016).

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, untuk itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan, yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri (Bender, 2016). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa bahwa; "Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima

kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa (Peraturan Pemerintah, 2005).

2.3 Partisipasi

Partisipatif berasal dari bahasa Inggris yaitu *participation* adalah pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, partisipasi merupakan keterlibatan aktif masyarakat atau partisipasi tersebut dapat berarti keterlibatan proses penentuan arah dari strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Partisipasi berarti memberikan sumbangan agar dalam pengertian kita mengenai pembangunan kita nilai-nilai kemanusiaan dan cita-cita mengenai keadilan sosial tetap dijunjung tinggi. Partisipasi dalam pembangunan berarti mendorong ke arah pembangunan yang serasi dengan martabat manusia. Keadilan sosial dan keadilan Nasional dan yang memelihara alam sebagai lingkungan hidup manusia juga untuk generasi yang akan datang (Lembaga Ketahanan Nasional, 2013).

Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif masyarakat dapat juga keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Partisipasi bukan hanya sekedar salah satu tujuan dari pembangunan sosial tetapi merupakan bagian yang integral dalam proses pembangunan sosial. Partisipasi masyarakat berarti eksistensi manusia seutuhnya, tuntutan akan partisipasi masyarakat semakin berjalan seiring kesadaran akan hak dan kewajiban warga Negara (Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Buleleng, 2017).

2.4 Transparan

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Nurohman, 2012). Tujuan dari transparansi adalah membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan public dimana pemerintah harus memberikan informasi akurat bagi public yang membutuhkan. Sedangkan tujuan transparansi yang dapat dirasakan oleh shakeholders dan lembaga adalah mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan melalui kesadaran masyarakat dengan adanya control sosial, menghindari kesalahan komunikasi dan perbedaan persepsi, mendorong masyarakat untuk belajar bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap pilihan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dan membangun juga meningkatkan kepercayaan semua pihak dari kegiatan yang dilaksanakan (Angker, 2022).

2.5 Akuntabel

Akuntabilitas adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (prinsipal) (Riziky, 2022). Salah unsur utama dari *Good Governance* adalah Akuntabilitas. Jadi, akuntabilitas pemerintahan sangat diperlukan sebagai penunjang penerapan otonomi Desa agar dapat berjalan dengan baik (Badan Perencana Daerah Kabupaten Buleleng, 2017). Selain akuntabilitas untuk pelaksanaan Pemerintahan yang baik juga diperlukan adanya unsur Transparansi. Transparansi dan Akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan Pemerintah maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik (*Good Governance*) (Cahyaningrum, 2019). Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektivitas, reliabilitas dan prediktibilitas. Keseluruhan proses penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), mulai dari usulan peruntukannya, pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan didepan seluruh pihak terutama masyarakat desa.

2.6 Penelitian Terdahulu

Kemiskinan adalah salah satu masalah dalam perekonomian yang selalu menjadi pusat perhatian dinegara manapun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh alokasi dana desa dan

pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Bolaang Mongondow Raya tahun 2015-2018. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Bolaang Mongondow Raya, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif tapi tidak signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Bolaang Mongondow Raya (Mamonto & Rotinsulu, 2020).

Pembangunan merupakan salah satu hal penting yang menjadi permasalahan di Indonesia, terutama pedesaan. Terlebih bangsa Indonesia yang secara geografis terdiri dari berbagai pulau dengan berbagai suku dan budaya yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji seberapa Efektif dana desa dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di desa Kolongan Satu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data lewat media social bersumber langsung dari kepala desa. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa Kolongan satu dari tahun 2015-2020 efektif dan berhasil. Hal tersebut terbukti dalam perhitungan rumus yang mencapai 100% dan itu dinyatakan Efektif (Tumiwa, 2021).

Desa merupakan sebuah komunitas kecil yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal dan juga tempat pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat desa yang bergantung kepada pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengelolaan dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat payabujuk beramo langsa yang berjumlah 2077 orang, sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik probability sampling dengan jenis pengambilan sampel simple random sampling sedangkan ukuran sampel diperoleh dari perhitungan menggunakan rumus Slovin dengan Tingkat kesalahan 5% dari 95 orang. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dalam bentuk kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana. Pengukuran kuesioner yang dijawab oleh responden menggunakan skala likert menggunakan Paket Statistik untuk Ilmu Sosial (SPSS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan memiliki pengaruh positif. Sedangkan nilai adjusted R² adalah 0,46 yang menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh model persamaan adalah 46,0 % (Sumarni, 2020).

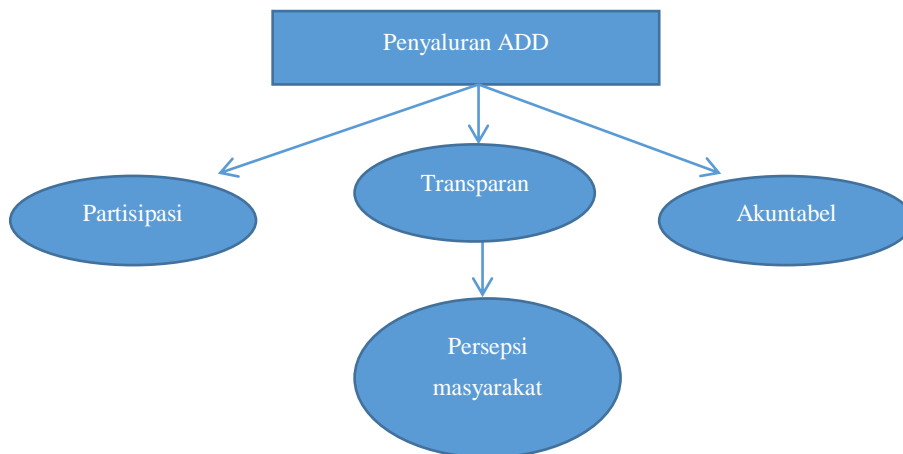
Desa atau sebutan-sebutan lain yang sangat beragam di Indonesia, pada awalnya merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat-istiadat untuk mengelola dirinya sendiri yang disebut dengan *self-governing community*. Desa pada umumnya mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hirarkhisstruktural dengan struktur yang lebih tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel partisipasi (x_1), transparan (x_2), dan akuntabel (x_3) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel efektivitas penyaluran alokasi dan desa di kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur. Hal ini ditunjukkan dengan nilai R sebesar 0,696 yang mana tersebut mendekati 1. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,446 atau 44,6% menerangkan bahwa variabel yang dikemukakan dalam model penelitian ini dapat mengukur atau mewakili 44,6% variabel yang mempengaruhi efektivitas penyaluran alokasi dana desa di kecamatan Teluk Pandan Kutai Timur. Secara parsial variabel partisipasi (x_1), transparan (x_2), dan akuntabel (x_3) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas penyaluran alokasi dana desa di kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,249, 0,344, 0,259 dan 0,270, melalui uji t diperoleh nilai t hitung masing-masing 1,705, 2,192, 2,195 dan 2,671 jika dibandingkan dengan t tabel (tingkat kepercayaan 95% uji dua sisi) sebesar 1,6632 maka terlihat bahwa thitung lebih besar dari ttabel sehingga dapat diterangkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan

positif antara variabel partisipatif, transparansi, akuntabel, dan berkelanjutan terhadap Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur (Djumadi, 2015).

Dana desa merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan di desa-desa di Indonesia, termasuk di Maluku Utara. Dari segi pendanaan pembangunan, desa dana berperan besar dalam peningkatan kualitas desa di Maluku Utara. Tapi di Bahkan, angka kemiskinan di Maluku Utara justru meningkat dengan alat analisis yang digunakan yaitu metode deskriptif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DD mampu untuk mengubah profil desa menjadi lebih baik, terutama dalam aspek jalan infrastruktur, air, sanitasi melalui pembangunan parit. (Harahap & Marpuah, 2020)

Kerangka Berpikir

Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran



Berdasarkan gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa persepsi masyarakat tentang tingkat partisipasi, transparan, dan akuntabel terhadap efektivitas penyaluran ADD itu sendiri dipengaruhi oleh faktor internal yang dimiliki masyarakat/individu seperti faktor personal, faktor struktural dan faktor evaluasi yang nantinya dapat memberi makna positif dan negatif terhadap efektivitas penyaluran ADD. Jika masyarakat memiliki rasa ingin tahu lebih dan mau ikut turut berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan bahkan tidak acuh terhadap program-program yang di buat pemerintah pasti akan menambah edukasi bagi masyarakat itu sendiri, maka masyarakat akan lebih memiliki persepsi yang positif terhadap efektivitas penyaluran ADD. Begitu juga sebaliknya, jika masyarakat tidak memiliki rasa ingin tahu lebih dan masa bodoh dengan setiap program-program pemerintah, maka masyarakat akan memiliki persepsi negatif terhadap efektivitas penyaluran ADD. Apabila dalam masyarakat terdapat persepsi positif terhadap efektivitas penyaluran ADD, maka hal tersebut baik untuk realisasi pembangunan desa.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan kualitatif. Tempat penelitian ini adalah di Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini menjelaskan hubungan antara variabel efektivitas penyaluran ADD sebagai variabel terikat dengan tingkat partisipasi, transparan dan akuntabel sebagai variabel bebas.

Data dan Sumber Data

Jenis data pada penelitian ini adalah data primer yang berupa kuesioner atau wawancara (skala likert). Sumber data dalam penelitian ini berasal dari responden, dimana dalam pengambilan datanya peneliti akan membagikan kuesioner kepada setiap responden. Setiap responden wajib menjawab setiap

pertanyaan yang ada pada kuesioner. Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 100 yaitu petani, pedagang, wiraswasta, karang taruna, kaum buruh, pemerintah desa, dan BPD

Tabel 1 Instrumen Skala Likert

No	Skala	Skor
1.	Sangat Setuju	5
2.	Setuju	4
3.	Ragu-Ragu	3
4.	Tidak Setuju	2
5.	Sangat Tidak Setuju	1

Sumber : Sugiyono (2016:168)

Tabel 2 Sampel dalam Penelitian

POPULASI	JUMLAH
Petani	12
Pedagang	14
Wiraswasta	13
Karang Taruna	12
Kaum Buruh	11
Pemerintah Desa	12
BPD	9
IRT	16

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini mrnggunakan metode analisis deskriptif untuk menganalisa data dengan caramendeskrripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi

Analisis Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Statistik yang digunakan dalam penelitian adalah rata-rata (mean), median, modus, deviasi dan lain-lain. Variabel penelitian ini adalah mengenai tingkat partisipasi, transparansi, dan akuntabel terhadap efektivitas penyaluran ADD. Setelah nilai rata-rata maka jawaban telah diketahui, kemudian hasil tersebut di interpretasikan bedasarkan tabel dibawah ini kemudian peneliti membuat garis kontinum.

$$\begin{aligned}
 \text{NJI (Nilai Jenjang Interval)} &= \frac{\text{Nilai Tertinggi}-\text{Nilai Terendah}}{\text{Jumlah Kriteria Pertanyaan}} \\
 &= \text{Lebar Skala} = \frac{5-1}{5} = 0,8 \\
 \text{a. Indeks Minimum} &: 1 \\
 \text{b. Indeks Maksimum} &: 5 \\
 \text{c. Interval} &: 5-1 = 4 \\
 \text{d. Jarak Interval} &: (5-1) : 5 = 0,8
 \end{aligned}$$

Tabel 3 Kategori Skala

Skala		Kategori
1,00	1,80	Sangat Tidak Baik
1,81	2,60	Tidak Baik
2,61	3,40	Kurang Baik
3,41	4,20	Baik
4,21	5,00	Sangat Baik

Sumber : Sugiono (2013:134)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Analisis

Tabel 4 Hasil Analisis dari Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Penyaluran ADD

NO	INDIKATOR	1	2	3	4	5	RATA-RATA	KESIMPULAN	
	PARTISIPASI (X1)	1	0	18	5	63	12	3.69	Baik
		2	0	0	3	74	20	4.17	Baik
		3	0	2	3	76	16	4.09	Baik
		4	0	1	4	65	27	4.23	Sangat Baik
		5	0	0	1	73	23	4.22	Sangat Baik
		6	0	0	0	80	17	4.17	Baik
								4.09	Baik

Sumber : Data diolah

Dari tabel 4 diatas, menunjukkan bahwa dari 6 soal yang telah dijawab, rata-rata masyarakat memilih setuju dengan jumlah rata-rata sebesar 4,09 dengan kesimpulan baik. Jadi,dapat dinyatakan bahwa tingkat partisipasi (X1) masyarakat ada berpengaruh terhadap efektivitas penyaluran ADD.

Tabel 5 Hasil Analisis dari Tingkat Transparan Terhadap Efektivitas Penyaluran ADD

	TRANPARANSI (X2)	7	0	2	14	74	7	3.89	Baik
		8	0	3	4	80	12	4.03	Baik
		9	0	0	3	70	23	4.16	Baik
		10	0	0	18	63	16	3.98	Baik
		11	0	0	0	42	54	4.55	Sangat Baik
		12	0	1	2	65	28	4.25	Sangat Baik
								4.14	Baik

Sumber : Data diolah

Dari tabel 5 diatas, menunjukkan bahwa dari 6 soal yang telah dijawab, rata-rata masyarakat memilih setuju dengan jumlah rata-rata sebesar 4,14 dengan kesimpulan sangat baik. Jadi,dapat dinyatakan bahwa tingkat transparan (X2) masyarakat ada berpengaruh terhadap efektivitas penyaluran ADD.

Tabel 6 Hasil Analisis dari Tingkat Akuntabel Terhadap Efektivitas Penyaluran ADD

AKUNTABILITAS (X3)	13	0	0	1	76	20	4.19	baik
	14	0	0	1	76	20	4.19	baik
	15	0	0	2	83	11	4.05	baik
	16	0	0	1	85	11	4.1	baik
							4.13	baik

Sumber : Data diolah

Dari tabel 6 diatas, menunjukkan bahwa dari 4 soal yang telah dijawab, rata-rata masyarakat memilih setuju dengan jumlah rata-rata sebesar 4,13 dengan kesimpulan sangat baik. Jadi, dapat dinyatakan bahwa tingkat akuntabel (X3) masyarakat ada berpengaruh terhadap efektivitas penyaluran ADD.

Tabel 7 Hasil Analisis dari Efektivitas Penyaluran ADD

NO	INDIKATOR	1	2	3	4	5	RATA-RATA	KESIMPULAN	
	PENYALURAN ADD (Y)	17	0	1	6	80	10	4.1	Baik
		18	3	6	10	66	13	3.83	Baik
		19	0	0	9	75	13	4.04	Baik
		20	1	2	7	75	12	3.98	Baik
		21	0	1	7	71	18	4.09	Baik
		22	0	0	4	78	16	4.12	Baik
								4.12	Baik

Sumber : Data diolah

Dari tabel 7 diatas, menunjukkan bahwa dari 6 soal yang telah dijawab, rata-rata masyarakat memilih setuju dengan jumlah rata-rata keseluruhan sebesar 4.12 dengan kesimpulan baik. Jadi, dapat dinyatakan bahwa tingkat partisipasi, transparansi dan akuntabel ada pengaruh terhadap efektivitas penyaluran ADD.

4.2 Pembahasan

1. Tingkat Partisipasi terhadap Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa di Desa Tontalet di Kabupaten Minahasa Utara.

Bedasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti adalah bahwa ada hubungan antara persepsi masyarakat partisipasi berpengaruh terhadap efektivitas penyaluran alokasi dana desa di desa Tontalet Kab. Minahasa Utara. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis deskriptif dengan rata-rata yang diperoleh sebesar 4.09 dengan kriteria skala baik. Karena nilai rata-rata sebesar 4.09 dengan kriteria skala baik maka hipotesis diterima. Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian terdahulu oleh Djumadi (2015) didalamnya ada teori R. Edward Freeman (1984:28) yang menyatakan bahwa stakeholder adalah individu-individu dan kelompok-kelompok yang dipengaruhi oleh tercapainya tujuan-tujuan organisasi dan pada gilirannya dapat mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan tersebut. Artinya stakeholder bisa merubah keadaan dari yang buruk menjadi baik dan yang baik menjadi buruk, tergantung pada upaya berkomunikasi dari yang mempunyai kepentingan dan yang dipentingkan sehingga pihak kerjasama bisa saling menguntungkan baik dari penyelenggara pemerintahan maupun pihak masyarakat. Karena stakeholder termasuk jalinan kerja sama terhadap masyarakat yang dinamakan partisipasi masyarakat. Tingkat partisipasi ini merupakan elemen yang penting diperhatikan oleh organisasi, karena partisipasi masyarakat diperlukan dalam menunjang keberhasilan Efektivitas Penyaluran ADD. Tanpa adanya

Partisipasi masyarakat maka akan sulit bagi sebuah organisasi/pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Tingkat Transparan terhadap Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa di Desa Tontalet di Kabupaten Minahasa Utara.

Bedasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti adalah bahwa partisipasi berpengaruh terhadap efektivitas penyaluran alokasi dana desa di desa Tontalet Kab. Minahasa Utara. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis deskriptif dengan rata-rata yang diperoleh sebesar 4.14 dengan kriteria skala baik. Karena nilai rata-rata sebesar 4.14 dengan kriteria skala baik maka hipotesis diterima.

Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian terdahulu oleh Marpuah (2020) menyatakan tingkat transparansi berpengaruh menyjahterahkan pendudu di Desa Wakan Lombok Timur sudah dilakukan dengan baik. Pengelolaan ADD dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat pembuatan informasi dari kegiatan atau program yang sumbernya dari ADD. Pertanggungjawaban secara fisik dan administrasi sudah cukup baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua pihak dapat mengetahui keseluruhan proses secara terbuka. Selain itu, diupayakan agar masyarakat desa dapat menerima informasi mengenai tujuan, sasaran, hasil, manfaat yang diperolehnya dari setiap kegiatan yang menggunakan dana ini.

3. Tingkat Akuntabel terhadap Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa di Desa Tontalet di Kabupaten Minahasa Utara.

Bedasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti adalah bahwa akuntabel berpengaruh terhadap efektivitas penyaluran alokasi dana desa di desa Tontalet Kab. Minahasa Utara. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis deskriptif dengan rata-rata yang diperoleh sebesar 4.13 dengan kriteria skala baik. Karena nilai rata-rata sebesar 4.13 dengan kriteria skala baik maka hipotesis diterima.

Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian terdahulu oleh Fhadilah (2019) yang menunjukkan bahwa tingkat akuntabel berpengaruh terhadap keberhasilan efektivitas penyaluran ADD. Dimana pemeriksaan yang dilakukan oleh audit atau perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku.

5. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa ada hubungan antara persepsi masyarakat tentang tingkat partisipasi tanpa adanya partisipasi masyarakat maka akan sulit bagi sebuah organisasi/pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Begitu pula hubungan antara persepsi masyarakat tentang tingkat transparan semua pihak dapat mengetahui keseluruhan proses secara terbuka. Selain itu, diupayakan agar masyarakat desa dapat menerima informasi mengenai tujuan, sasaran, hasil, manfaat yang diperolehnya dari setiap kegiatan yang menggunakan dana ini. Demikian juga hubungan antara persepsi masyarakat tentang tingkat akuntabel proses akuntabel penting untuk laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga dapat menjadi tolak ukur dalam terselenggaranya ADD dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Angker, R. (2022). *PENTINGNYA TRANSPARANSI PELAYANAN PUBLIK*.
<https://setda.dompukab.go.id/author/rank-setdamin>

- Badan Perencana Daerah Kabupaten Buleleng. (2017). *Pengertian Partisipasi*. <https://prokomsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-prinsip-dan-penerapan-good-governance-di-indonesia-99>
- Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Buleleng. (2017). *Teori Partisipasi : Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Menurut Para Ahli*. <https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/teori-partisipasi-konsep-partisipasi-masyarakat-dalam-pembangunan-menurut-para-ahli-10>
- Baura, J., & Mandey. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana (ADD) (Suatu Studi Di Desa Bukumatiti Kecamatan Jailolo Kabuapten Halmahera Barat) JULISKA BAURA*.
- Bender, D. (2016). DESA - Optimization of variable structure Modelica models using custom annotations. *ACM International Conference Proceeding Series*, 18-April-2(1), 45–54. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Cahyaningrum, S. R. (2019). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Losari Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang. *Counting: Journal of Accounting*. <http://jkm.stiewidyagamalumajang.ac.id/index.php/jra/article/view/192>
- Daerah, P. P. tentang P. K. (2005). *Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. 9 Desember 2005. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49730/pp-no-58-tahun-2005>
- Djumadi, J. (2015). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Administrative Reform*, 3(1), 1–13.
- Dr. Sumule Tumbo, SE., M. (2019). Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Daerah. *Ilmu Pemerintahan*, 1–28. [http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/pusat/files/Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Daerah-BPKP.pdf](http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/pusat/files/Gambaran%20Umum%20Pengelolaan%20Keuangan%20Daerah-BPKP.pdf)
- Fhadilah. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Alokasi Dana Desa di Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo-Jambi. *TASAMUH: Jurnal Studi Islam*, 11(1), 125–150. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v11i1.176>
- Franseen, C. . (2021). *Pengertian, Tujuan dan Prinsip Otonomi Daerah*.
- Harahap, I., & Marpuah, S. (2020). *Welfare Of North Maluku Communities*. 5(1), 205–230.
- Hartanto. (2017). *LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Daerah*. <https://adoc.pub/bab-ii-landasan-teori-dan-kerangka-pemikiran-pengertian-dan-.html>
- Lembaga Ketahanan Nasional. (2013). *Perpustakaan Lemhannas RI*. <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-011600000000269/swf/5943/files/basic-html/page11.html>
- Mamonto, C., & Rotinsulu, T. O. (2020). Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten / Kota Bolaang Mongondow Raya Tahun 2015-2018. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(03), 33–44.
- Maros, H., & Juniar, S. (2016). *Pemendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan*. 1–23.

- Marpuah. (2020). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Wakan Lombok Timur. *Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan Dan Inovator Pendidikan*, 6(2), 144–156. <https://doi.org/10.29408/jhm.v6i2.3718>
- Nurohman, L. A. (2012). *Pemahaman PP No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)*. <http://balitbang.magelangkota.go.id/index.php/drd/110-pemahaman-pp-no-24-tahun-2005-tentang-standar-akuntansi-pemerintahan-sap>
- Peraturan Pemerintah. (2005). PP No 72 Tahun 2005 Tentang Desa. *Materia Japan*, 44(1), 24–31. <https://doi.org/10.2320/materia.44.24>
- Riziky, D. (2022). *Akuntabilitas adalah Kunci: Prinsip dan Contoh Akuntabilitas*. <https://majoo.id/solusi/detail/akuntabilitas-adalah>
- Sumarni, M. (2020). Pengaruh pengelolaan alokasi dana desa terhadap Peningkatkan kesejahteraan masyarakat. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 77–90. <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v5i1.1498>
- Tumiwa, D. (2021). Efektivitas kebijakan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa kolongan satu kecamatan kombi kabupaten minahasa. *Jurnal Beraka Ilmiah Efisiensi*, 21(01), 91–99.